



Gerakan Menuju

**100**  
Smart City

2018



## MENGA PA GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY DILAKUKAN?

“Saya sangat mengapresiasi semangat kepala daerah dalam mewujudkan Smart City. Sekarang kami ingin menata semua inisiatif Smart City tersebut sehingga lebih terarah”

**RUDIANTARA**, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

# GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY

## TUJUAN

Membimbing 100 Kota/Kabupaten terpilih untuk merencanakan pengembangan Smart City di daerah masing-masing dengan memperhitungkan tantangan maupun potensi tiap daerah.

## EKOSISTEM

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kantor Staf Presiden, APEKSI, daerah yang memiliki KKD memadai, penyedia teknologi, dan Media.



## RANGKAIAN KEGIATAN

Rangkaian kegiatan assessment, pembukaan, bimbingan teknis, FGD, penutupan, evaluasi.

## TAHAPAN PROGRAM

2017: 25 Kota  
2018: 75 Kota  
2019: Program



# MENGAPA SMART CITY ?

Pada tahun 2045, diperkirakan 82,37% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Untuk menjawab permasalahan sekaligus memanfaatkan potensi ini secara efektif, pemerintah kota harus bisa memanfaatkan teknologi.

## PENETRASI PENGGUNA INTERNET



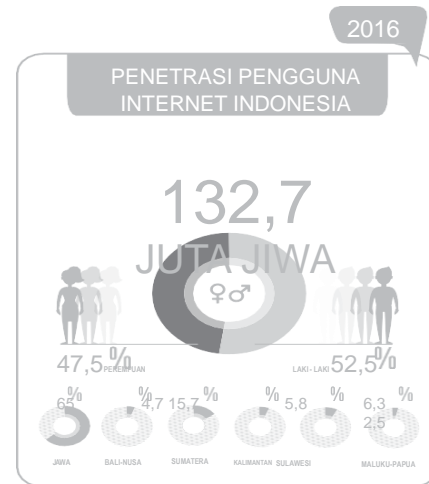
54,68 % 

143,26  
JUTA JIWA



DARI TOTAL  
POPULASI  
PENDUDUK  
INDONESIA

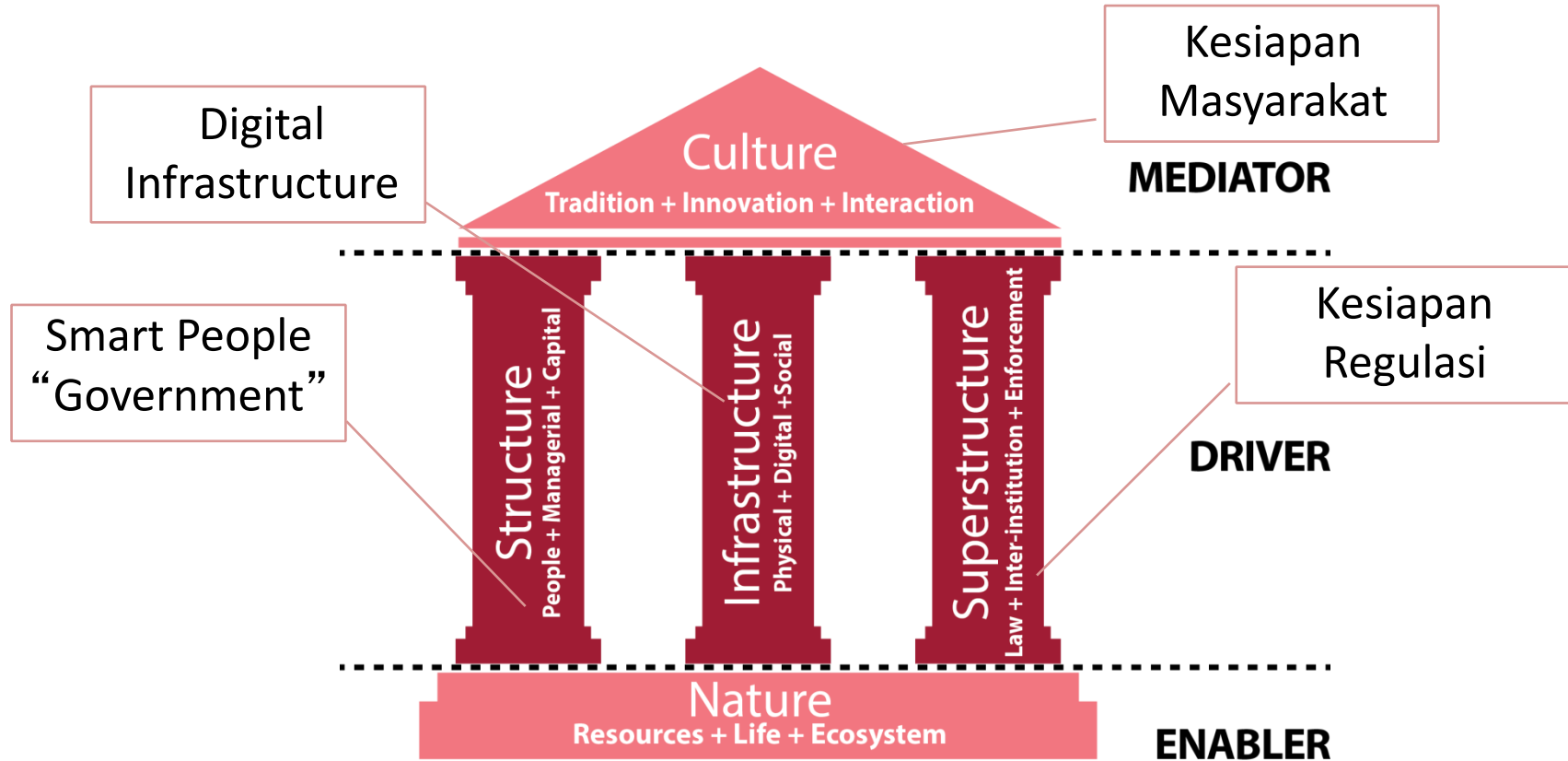
262 JUTA



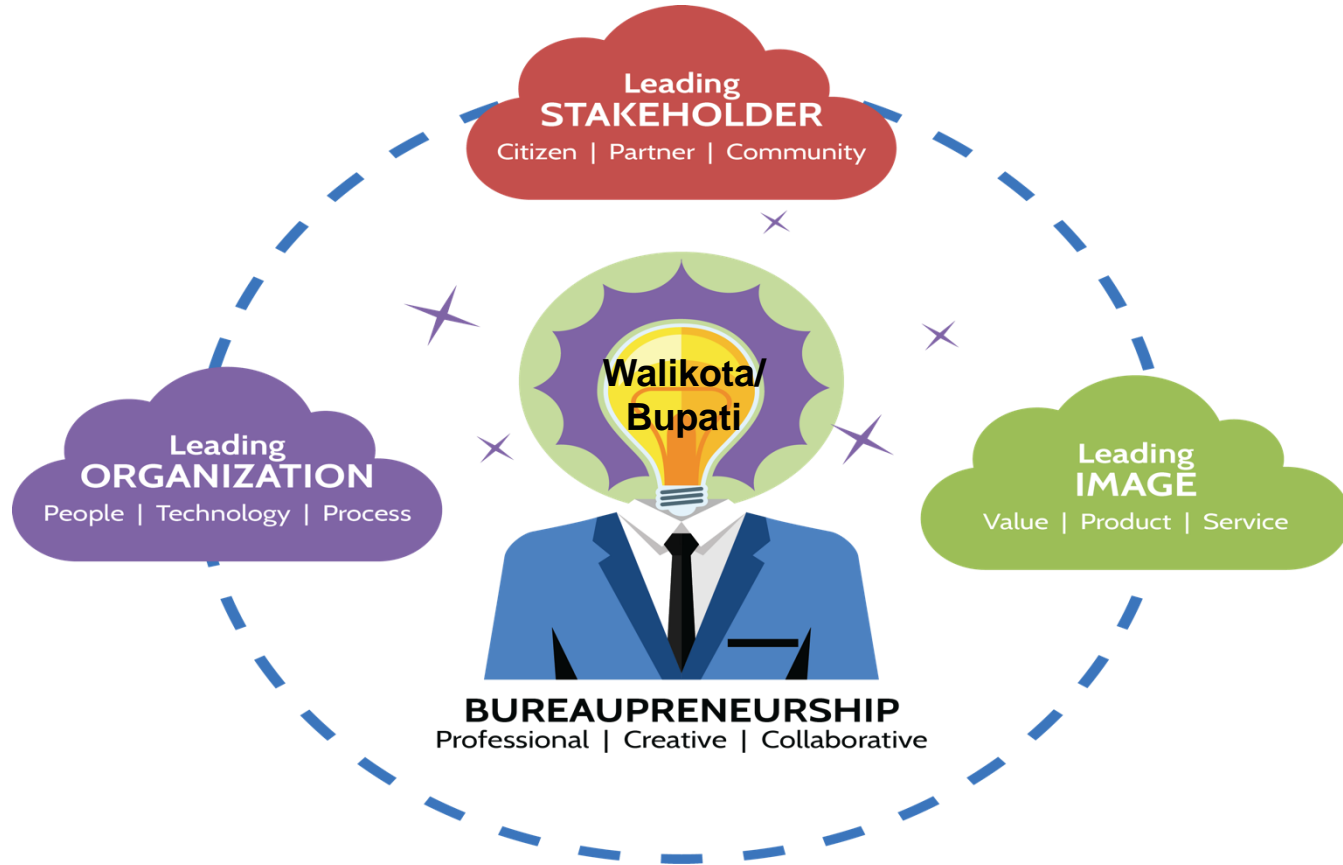
# Landasan Hukum

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017-2019 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia.

# Bagaimana Membangun Kesiapan Menjadi Smart Cities?



# Leadership Merupakan Kunci Sukses “Smart City”





# Apa Manfaat Smart City?

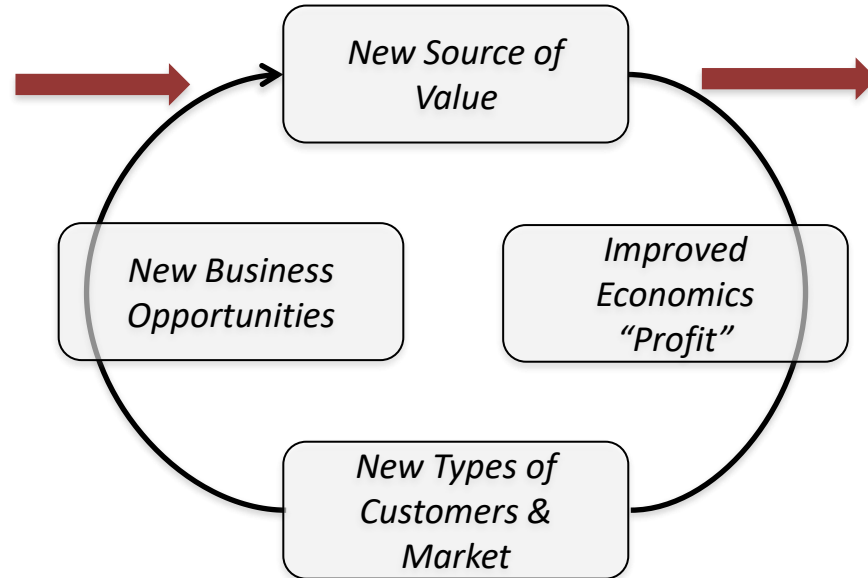


## Government

- **Smart Government**
  - **Efficiency**
  - **City Branding**
- **Attracting Trade, Tourists, Investors**
- **New Source of Income (PAD)**



## Business



## Society

- **Smarter**
- **Easier**
- **Wealthier**
- **Safer**
- **Healthier**
- **Comfortable**
- **Creative**
- **Competitive**
- **Sustainable**



# (1) Smart Governance

**Sasaran** : mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

## a. Pelayanan Publik (Public Service)

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.

## b. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (Bureaucracy)

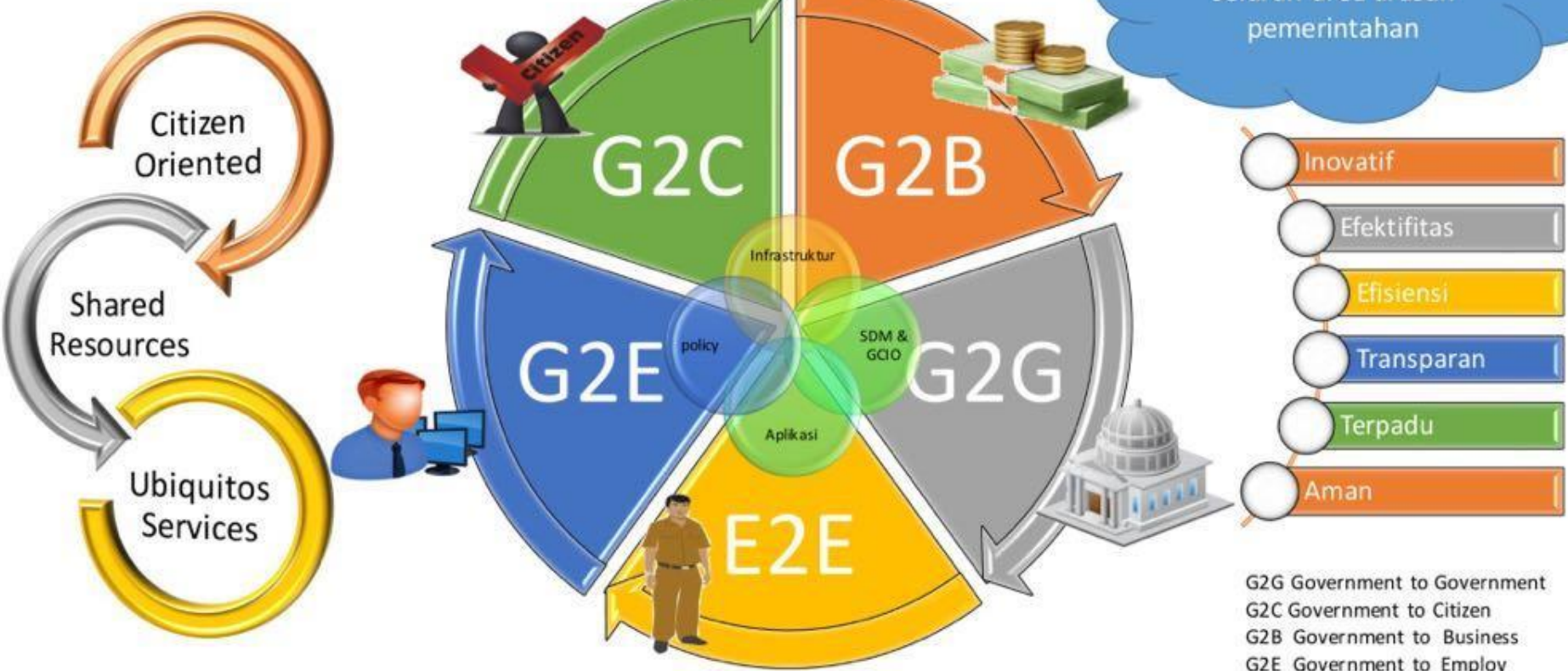
- Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (*fairness*), bertanggung-jawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*). Misalnya: sistem e-planning, e-budgeting, e-monev dan lain-lain. Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju *integrated & inter-operability e-gov* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Gov. Pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah “City Operation Center (COC)”.

## c. Efisiensi Kebijakan Publik (Public Policy)

- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

# PRINSIP- PRINSIP Smart Governance

eGovernment mencakup seluruh area urusan pemerintahan



G2G Government to Government  
G2C Government to Citizen  
G2B Government to Business  
G2E Government to Employee  
E2E Employ to Employ

## (2) Smart Branding

**Sasaran** : peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

### a. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)

- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (*destination*).
- Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (*amenities*) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/bedding & breakfast (B&B), restoran, dan lain-lain.
- Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (*hospitality*) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain.

### b. Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)

- Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market place daerah.
- Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya Investment Lounge, Dashboard, dan Portal Investasi Daerah.
- Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, fashion, digital, dan lain-lain

### c. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)

- Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.
- Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.

### (3) Smart Economy

**Sasaran** : mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society* .

#### a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*industry*)

- Membangun daya saing industri daerah pada *leading sector* industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, *packaging* dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).

#### b. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)

- Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*)
- Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*)
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).

#### c. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)

- Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang *less cash*
- Mewujudkan masyarakat yang *bankable* dan memiliki akses terhadap permodalan
- Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri e-commerce dan market place.

## (4) Smart Living

**Sasaran** : mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

### **a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)**

- Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*).

### **b. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)**

- Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (*healthcare*), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*).

### **c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)**

- Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (*mobility*) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

## (5) Smart Society

**Sasaran** : mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

### a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*)

- Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (*digital*) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan Smart City misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain.
- Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang market place dan lain-lain.

### b. Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (*Learning*)

- Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang *disable*.
- Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training program* dan lain-lain.

### c. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)

- Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau *Internet of Thing (IoT)*.



## (6) Smart Environment

**Sasaran** : mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

### a. Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*)

- Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada *Internet of Thing (IoT)*.
- Membangun ruang terbuka hijau
- Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi
- Mengendalikan polusi udara

### b. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)

- Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (*household*)
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (*industrial*)
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (*public*)
- Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.

### c. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (*Energy*)

- Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab
- Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.

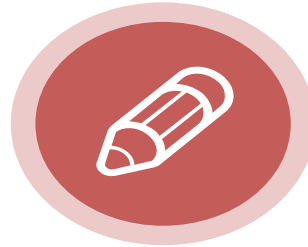
# Bagaimana Membangun Smart City?



Menentukan  
Pola Anggaran

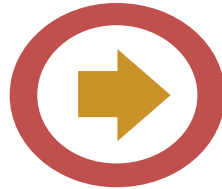


- **Option 1** : Swa Anggaran (APBD)
- **Option 2** : Public Private Partnership (PPP)
- **Option 3** : Sponsorship (CSR)



## 1. Smart City Planning

- Masterplan pembangunan Smart City pada prioritas sektor unggulan daerah
- Blueprint implementasi Smart City (DED)



## 2. Smart City Readiness

- Pembangunan infrastruktur ICT
- Pembangunan Infrastruktur Fisik
- Pembangunan Infrastruktur Sosial, misalnya technopark, taman, bandara dll.)
- Aturan pendukung Smart City



## 3. Smart City Development

Impementasi Pembangunan Smart City, misalnya: Integrasi & Interoperability e-Gov (Smart-gov), Investment Center, Ekosistem Smart Economy (eg. Smart UKM), Smart Fisheries, Smart Agriculture, dll.





# Transformasi Budaya Pemerintah



eGovt bukan sekedar mengganti teknologi konvensional dengan perangkat sistem elektronik yang canggih, namun tentang merubah budaya birokrasi dan pemerintahan agar lebih efektif, efisien dan bertanggungjawab.

Ada kemauan banyak jalan, tidak ada kemauan banyak alasan



# KONDISI YANG DIINGINKAN



Birokrasi berkinerja tinggi: integratif, transparan, dinamis, dan inovatif



Pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses



Inovasi TIK yang efektif, efisien, dan terintegrasi: mobile internet, Cloud, IoT, Big Data, dan AI



SDM yang memiliki kepemimpinan (kolaboratif dan inovatif) dan kompetensi



# Transformasi **Pelayanan Publik** melalui inovasi



Proses manual (walau pakai komputer), → ke proses sistemik eGovernment



Birokrasi tertutup → ke Birokrasi terbuka.

Mendorong peran private dalam proses pelayanan publik pemerintah



Dari pendekatan administratif → ke pendekatan kualitas pelayanan publik



Pelayanan berbasis SILO → ke Government Cloud Computing



# Mendorong Pelayanan Publik 4.0

SILO/SEKTORAL

Sektor Perijinan

Sektor Kependudukan

Sektor Pendidikan

Sektor Kesehatan

Dan lain-lain

Pemerintah

Dunia Usaha

Akademisi

Masyarakat

Mobil

e

Cloud

IoT

AI

Mudah

Murah

Cepat

Transparan

Terpadu

Aman

Daya saing bangsa meningkat

Kapasitas Indonesia untuk berperan dalam hubungan eGovernment Internasional

Pemerintahan yang baik

**Kelembagaan,  
Perencanaan, dan  
Kebijakan Smart City**

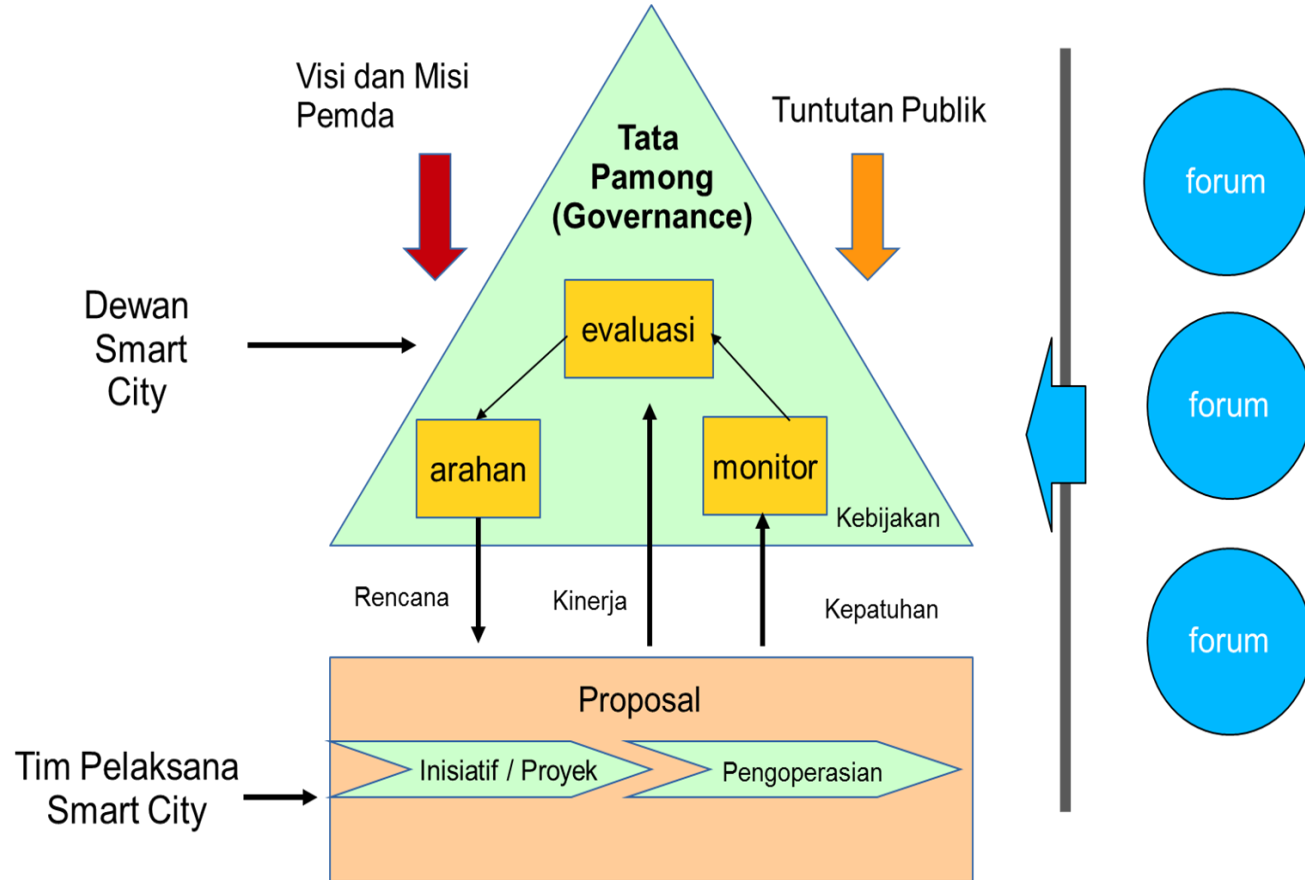
# Pembangunan Kelembagaan Smart City

Kegiatan ini menghasilkan terbentuknya dan operasionalisasi dari antara lain:

- 1) Dewan Pengarah Smart City (dibentuk baru atau dirangkap Dewan Sejenis)
- 2) Tim Teknis Pengembangan Smart City (lintas bidang/dinas)
- 3) Kelengkapan organisasi dan satuan kerja operasional lain (satgas spesifik, project management office)
- 4) Kemitraan (pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, perguruan tinggi dan pihak lain)
- 5) Integrasi perencanaan smart city ke dalam rangkaian Musrenbang Daerah
- 6) Forum Smart City dari unsur masyarakat, diluar kelembagaan formal, namun dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah



# Hubungan Kelembagaan Smart City





**TERIMA KASIH**